

*PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI SUMATERA BARAT*

TUGAS AKHIR

Disajikan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

CAKRA EKA PUTRA

NIM. 15344

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FALKUTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013

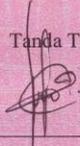
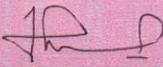
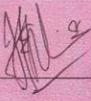
PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI
SUMATERA BARAT

Nama : CAKRA EKA PUTRA
NIM : 15344
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 22 Januari 2013

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Charoline Cheisviyanny, Se M.Ak	
Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak	
Anggota	Herlina Helmy, SE, M.SAK	

ABSTRAK

Cakra Eka Putra : Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi Sumatera Barat

Pembimbing : Charoline Cheisviyanni, SE, M.Ak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pelayanan Penerimaan Propinsi Sumatera Barat dan menjelaskan permasalahan- permasalahan nyata bagi wajib pajak yang terjadi saat pemungutan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data langsung dari UPTD P3 Sumatera Barat dan menanyakan bagaimana prosedur dan permasalahan yang biasa terjadi.

Berdasarkan hasil yang didapat, penulis dapat memberikan kesimpulan tentang bagaimana prosedur dan permasalahan apa saja yang dapat atau biasa terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pelayanan Penerimaan Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor terdiri dari 2 (dua) loket, yaitu loket 1 pendaftaran dan penetapan dan loket 2 pembayaran dan penyerahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, Hidayah, Ridho, Nikmat, dan Karunia-Nya serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi Sumatera Barat”** ini dengan baik. Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dalam bidang ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Nelvarita, SE, M.Si,Ak selaku anggota pelaksana Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M,Ak selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M,Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis yang sangat membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

5. Bapak henri Agustin, SE, M.Sc.Ak dan Ibu Herlina Helmi, SE, MS.Ak sebagai Penguji, yang telah bersedia menjadi penguji, memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahkan.
7. Kepala, seluruh Staf dan karyawan UPTD Penerimaan Pendapatan Propinsi Sumatera Barat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini dan pada saat ujian Kompre. Terima kasih telah hadir selalu bersamaku.
9. Saudara- saudaraku Kak Ica, Cori yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk rajin mengerjakan tugas akhir ini, dan adik ku Cici semoga dapat menyelesaikan kuliahnya setelah ini.
10. Teman-teman angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, terutama di jurusan Akuntansi Diploma III (Ajo Kecap, Daguak, Sasdi, Wazi B, Ilham, Dewa, ajo Naslil, lambok. Dan kepada da zal, Uwo, Dedi, iwan, irvan kalian harus tetap semangat dan terus berusaha semoga diberikan kemudahan nantinya menyelesaikan TA nya dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu).

11. Ucci terima kasih juga dukungannya dan juga konsumsi TA nya, terima kasih banyak telah membantu penulis selama menyelesaikan studi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap agar penulisan tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 22 Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II tinjauan Pustaka.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian pajak	8
2. Sistem pemungutan pajak.....	9
3. Azas- azas pemungutan pajak.....	11
4. Fungsi pajak	11
B. Pajak daerah	12
1. Pengertian pajak daerah.....	12
2. Pembagian pajak daerah	13
3. Ciri- ciri pajak daerah.....	14
4. Prinsip- prinsip pajak daerah	15
C. Pajak kendaraan bermotor	18
1. Pengertian pajak kendaraan bermotor	18
2. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor	18
3. Objek pajak kendaraan bermotor	20
4. Subjek pajak kendaraan bermotor	20
5. Wajib pajak kendaraan bermotor	20
6. Tarif pajak kendaraan bermotor	21
7. Pajak progresif.....	21

8. Landasan hukum pajak kendaraan bermotor.....	22
BAB III Pendekatan Penelitian	25
A. Bentuk penulisan tugas akhir.....	25
B. Lokasi dan waktu penelitian	25
C. Rancangan penelitian	25
1. Jenis penelitian	25
2. Objek penelitian	25
3. Sumber data	26
4. Teknik analisis.....	26
BAB IV Pembahasan	27
A. Gambaran umum.....	27
1. Profil instansi.....	27
2. Tugas pokok dan fungsi UPTD	29
3. Visi dan misi.....	30
4. Tujuan.....	31
5. Struktur organisasi.....	31
B. Pembahasan.....	33
1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak.....	33
2. Mekanisme kerja pendaftaran, pembayaran dan penyerahan pajak	37
3. Masalah- masalaha yang terjadi	42
BAB V Penutup	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan suatu usaha untuk mengadakan suatu perubahan dan kemajuan atau pertumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Selanjutnya dalam rangka pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah selalu berusaha meningkatkan usaha-usaha dan pertumbuhan perekonomian daerah, yang memerlukan penyediaan sumber- sumber pendapatan daerah agar mampu memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor. 34 Tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Berdasarkan Undang- undang No. 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan sumbangan cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah yang menjadi primadona pajak propinsi dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera

Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) dengan kontribusi sebesar $\pm 82,40\%$.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) yang dipungut melalui Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) bekerja sama dengan unsur Kepolisian, PT. Jasa Raharja (Persero), dimana saat ini di Propinsi Sumatera Barat terdapat 15 kantor bersama SAMSAT, dan kantor bersama SAMSAT Padang merupakan yang terbesar memberikan kontribusi PKB/BBNKB yaitu $\pm 82,40\%$ dari PAD, oleh karena itu sudah sewajarnya Kantor Bersama SAMSAT harus mampu memberikan pelayanan yang baik terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan tuntutan masyarakat yang terus bergulir dengan mengembangkan paradigama Kepemerintahan yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, penegak hukum, profesionalisme, kesetaraan dan lain- lain.

Dilihat dari perkembangannya jumlah masyarakat yang berada di Propinsi Sumatera Barat hampir keseluruhan memiliki kendaraan bermotor, hal ini merupakan suatu potensi dalam pendapatan daerah. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini akan menambah penerimaan daerah, dan nantinya akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan daerah tersebut. Namun berbagai permasalahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut dapat dikatakan cukup banyak yang diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut yang menyebabkan timbulnya beberapa masalah dalam pemungutannya. Untuk itu akan sangat diperlukan berbagai informasi tentang pajak tersebut.

Berbagai pelayanan yang diberikan SAMSAT untuk memudahkan wajib pajak untuk pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang diantaranya SAMSAT Keliling yang datang langsung menemui masyarakat ketempat- tempat tertentu, dan sekarang yang masih dalam tahap percobaan yaitu system SAMSAT Link, dan SAMSAT Drivethru . Pada SAMSAT Keliling ini hanya melayani pajak ulang kendaraan bermotor, sedangkan untuk urusan lain masih belum dapat dilakukan disini.

Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini, besarnya jumlah pajak yang terutang ditetapkan dan dihitung oleh fiskus sebagai pemungut Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan wajib pajak mempunyai tanggung jawab menyetor besarnya jumlah pajak yang terutang tersebut. Sistem inilah yang disebut *official assessment system*. Dari sistem ini terlihat bahwa pihak fiskus mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Adapun dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yakni nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak memerlukan sarana administrasi yang jelas dan harus mengetahui dengan jelas prosedur untuk menyampaikan serta memenuhi kewajiban tersebut. Karena penyelenggaraan yang baik dan penjelasan maksud dan tujuan terhadap

wajib pajak tentang sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak merupakan suatu usaha yang patut untuk dijelaskan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dalam sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan berdampak juga kepada peningkatan penerimaan asli daerah dalam sektor pajak tersebut. Sarana tersebut adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan mengetahui dan menguasai prosedur dan tata cara pengisian SPTPD, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan dan ketimpangan yang sering dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajibannya. Minimnya pengetahuan wajib pajak dalam melakukan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, menyebabkan terjadinya kesalahan dalam sistem administrasi.

Akan tetapi pemahaman wajib pajak akan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor juga penting, karena dengan adanya pengetahuan tentang prosedur maupun maksud dan tujuan dari pajak tersebut akan meningkatkan kesadaran dan keinginan wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pendapatan dari hasil pajak kendaraan bermotor ini juga nantinya akan digunakan untuk membangun daerah tersebut, seperti pembangunan jalan jembatan maupun perbaikan jalan dan jembatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Untuk itu penulis akan mengangkat judul “*PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI SUMATERA BARAT* “

B. Perumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu prioritas utama penerimaan provinsi Sumatera Barat, yang mana peranannya cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, penyelenggaraan yang baik dan penjelasan maksud dan tujuan terhadap wajib pajak tentang sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak merupakan suatu usaha yang patut untuk dijelaskan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dalam sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan berdampak juga kepada peningkatan penerimaan asli daerah dalam sektor pajak tersebut. maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi permasalahan wajib pajak di UPTD Sumatera Barat adalah :

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Apa saja hambatan atau masalah yang biasa terjadi saat pemungutan pajak kendaraan bermotor.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan terhadap pelayanan dan pengawasan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk menjelaskan masalah yang biasa terjadi saat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta menjelaskan bagaimana prosedur dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi UPTD P3 SUMATERA BARAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi UPTD P3 SUMATERA BARAT khususnya gambaran mengenai proses atau prosedur dalam penerimaan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan masukan dalam melakukan pelayanan.